



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada ialah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada
2. Bupati adalah Bupati Ngada
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 dan RPJMD.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2020.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa pada
tanggal 15 Maret 2017

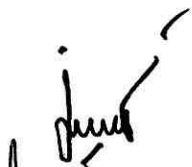
BUPATI NGADA,



MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA



MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016-2020.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGADA

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama perangkat daerah...) KABUPATEN NGADA

Nomor : /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama PD....) KABUPATEN NGADA

KEPALA (...nama PD....) KABUPATEN NGADA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Ngada Nomor ... Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...);
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (nama pd...)
- Mengingat : 1.
- 2.
3. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...) KABUPATEN NGADA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Ngada, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama PD...) Kabupaten Ngada dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD...) Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ngada dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala(...nama PD...) Kabupaten Ngada.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngada
pada tanggal
KEPALA(...nama PD.....)
Kabupaten Ngada

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat /Golongan)
(NIP.)

BUPATI NGADA,


MARIANUS SAE

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGADA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...)
KABUPATEN NGADA

Nama Perangkat Daerah :
Tugas :
Fungsi : 1.....
2.....
3. dst

No.	Sasaran strategis		Indikator Kerja Utama PD	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra PI	Sasaran RPJMD yang diacu					

KEPALA PD
ttd
(Nama, lengkap dan Titel)
(Pangkat /Golongan)
(NIP.)

BUPATI NGADA,

MARLANUS SAE

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TANGGAL 15 MARET 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

1. INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

2. VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3. MISI :

1. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan;
3. Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan;
4. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
6. Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat;
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

4. TUJUAN :

1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik;
2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada;
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Sektor Pertanian;
4. Menciptakan system tataniaga;
5. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung

6. Meningkatkan Kemampuan Usaha Ekonomi Masyarakat Perkotaan;
7. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul;
8. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
9. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat;
10. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam;
11. Penguatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
12. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan Keagamaan;
13. Penyediaan Sarana dan Fasilitas Olah Raga yang terintegrasi (inhal) Bagi Masyarakat;
14. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	SARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.	1. Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik	Panjang jalan kabupaten yang menjadi baik	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU & FR
2	Terbukanya akses transportasi dari dan	2. Persentase panjang Jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam	Jumlah panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan $\frac{\text{jumlah panjang jalan kabupaten}}{\text{pusat - pusat kegiatan}} \times 100$	Hasil survei dan laporan	Dinas PU & FR

	menuju wilayah-wilayah potensial	Kabupaten		data	
3	Terseciannya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada	3. Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Hasil survei dan laporan data	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Terseciannya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada	4. Persentase KK yang telah terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	Hasil survei dan laporan data	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Terseciannya kebutuhan rumah layak huni pada semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada	5. Persentase rumah tdk layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Hasil survei dan laporan data	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi sektor pertanian	6. Produktifitas padi per hektar	Jumlah produksi padi (ton) per hektar	Laporan Tahunan	Dinas Pertanian

			diremajakan (Ha)			Tahunan	
			Luas Areal Produksi Hortikultura (Ha)	22.	Luas Areal Produksi Hortikultura	Laporan Tahunan	Dinas Pertanian
7.	Meningkatnya keberagaman produk sektor pertanian		Persentase produksi industri kelapa olahan (%)	23.	Jumlah kelapa olahan/jumlah produksi X 100	Laporan Tahunan	Dinas Koperasi, JKM dan Perdagangan
			Persentase produksi pisang olahan (%)	24.	Jumlah pisang olahan/jumlah produksi X 100	Laporan Tahunan	Dinas Koperasi, JKM dan Perdagangan
8.	Meningkatnya pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata		Persentase kunjungan wisata	25.	Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n)-(n-1) / Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n-1) x 100%	Laporan Tahunan	Dinas Pariwisata
9.	Teratnya kegiatan pariwisata		Tersedianya regulasi daerah tentang tata riaga komoditi pertanian local	26.	Jumlah perda yang ditetapkan tentang tata riaga	Laporan Tahunan	Bagian Perekonomian; Bagian Hukum
10.	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota		Tersedianya Dokumen Penataan Ruang Kota	27.	Jumlah dokumen penataan ruang kota yang dihasilkan	Laporan Tahunan	Dinas PUPR
			Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	28.	Jumlah Perda Penataan Ruang yang dihasilkan	Laporan	Dinas PUPR, BP dan ITBANG dan

							Bagian Hukum
				29.	Presentase daerah permukiman kumuh	$\sum \text{Daerah Perumahan Kumuh}$ $\times 100$	Dinas PKPP
				30.	Jumlah titik-titik genangan air dalam kota yang terselesaikan	$\sum \text{Daerah Kawasan permukiman Perkotaan}$ Jumlah titik genangan air dalam kota yang sudah ditangani	Dinas PKPP Laporan Tahunan
				31.	Presentase sampah yang diolah pada TPST	$\sum \text{sampah yang diolah pada TPST (ton)}$ $\sum \text{produksi sampah setahun (ton)}$ $\times 100$	Dinas Lingkungan Hidup
				32.	Presentase pelayanan pengangkutan sampah	$\sum \text{Jumlah sampah yang diangkut (ton)}$ $\sum \text{produksi sampah setahun (ton)}$ $\times 100$	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman			33.	Presentase kendaraan layak operasi	$\sum \text{kendaraan yang diuji (KIR)}$ $\sum \text{kendaraan wajib uji (KIR)}$ $\times 100$	Dinas Perhubungan
				34.	Tersedianya trayek angkutan dalam kota Bajawa	Jumlah trayek angkutan dalam kota	Dinas Perhubungan

		35.	Berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas	$\frac{\sum \text{pelanggaran lantas tahun n}}{\sum \text{pelanggaran lantas (tahun n-1)}} \times 100$		Dinas Perhubungan
12.	Meningkatnya skala usaha UMKM masyarakat perkotaan	36.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan usaha UMKM masyarakat perkotaan	$\frac{\sum \text{UMKM yang di bina}}{\sum \text{UMKM (2.46 UMKM)}} \times 100$		Dinas Koperasi, JKM dan Perdagangan
13.	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar	37.	Meningkatnya angka partisipasi murni :		Laporan Program/ Kegiatan	Dinas Pendidikan
			PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 0 - 6 thn di PAUD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 5 thn}} \times 100$		
			SD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 thn di SD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 thn}} \times 100$		
			SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 thn di SMP/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 thn}} \times 100$		
		38.	Prosentase Partisipasi Kasar		Laporan Program/ Kegiatan	Dinas Pendidikan
			PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan di PAUD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 5 thn}} \times 100$		
			SD	$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan di SD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 thn}} \times 100$		

		SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 thn}} \times 100$		
		39. Angka Rata - rata Lama Sekolah	$\frac{\sum \text{penduduk 15 thn keatas yg sedang sekolah atcu berijalah penduduk 15 th}}{\text{jumlah penduduk 15 th}}$	Laporan Program/ Kegiatan	Dinas Pendidikan
		40. Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan		Laporan Program/ Kegiatan	Dinas Pendidikan
		SD	Nilai Rata-Rata Kelulusan		
		SMP	Nilai Rata-Rata Kelulusan		
14.	Meningkatnya kualitas siswa dan tenaga pendidik	41. Meningkatnya Nilai Rata-Rata Uji Kompetensi Guru	Standar Nilai Kelulusan Uji Kompetensi Guru	Laporan Program/ Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15.	Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi	42. Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA	$\frac{\text{Jumlah penduduk berijazah SMA}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$	Laporan Program/ Kegiatan	
		43. Meningkatnya persentase Penduduk dengan ijazah tertinggi Perguruan tinggi	$\frac{\text{Jumlah penduduk berijazah perguruan Tinggi (D3 -- S3)}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times$	Laporan Program/ Kegiatan	
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	44. Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan lama hidup rata2 penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola	Laporan program	Dinas Kesehatan

kesehatan dasar dan rujukan			mortalitas menurut umur		
	45	Jumlah Kasus Kematian Balita	Jumlah kasus kematian balita (0-59 bulan) pada kurun waktu tertentu.	Laporan program	Dinas Kesehatan
	46.	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah kasus kematian bayi sesaat setelah lahir sampai sebelum berusia tepat 1 tahun pada kurun waktu tertentu.	Laporan program	Dinas Kesehatan
	47.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah kasus kematian ibu sebagai akibat dari kehamilan, persalinan dan nifas.	Laporan program	Dinas Kesehatan
	48.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di sarana kesehatan strata 1 pada kurun waktu tertentu ----- x 100 Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Ngada	Laporan program	Dinas Kesehatan
	49.	Cakupan pelayanan rujukan masyarakat miskin	Jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan 3 ----- x 100 Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Ngada	Laporan program	Dinas Kesehatan

		50.	Rasio Dokter yang sesuai standar nasional	Jumlah dokter tahun n ----- x 100.000 jumlah penduduk	Laporan	Dinas Kesehatan dan RSUD Bajawa
17.	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	51.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Laporan	Dinas Kesehatan
		52.	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	Jumlah rumah yang memenuhi indikator PHBS ----- x 100 Jumlah rumah tangga diperiksa	Laporan	Dinas Kesehatan
18.	Meningkatnya kualitas keluarga	54.	Cakupan Peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif ----- x 100 Jumlah pasangan usia subur	Laporan	Dinas KCS
19.	Terperluhinya hak masyarakat yang terkena dampak	55.	Persentase Bencana Alam yang ditangani	$\frac{\text{Jml Bencana Alam yang ditangani}}{\text{Jml Bencana Alam yang terjadi}} \times 100$	Laporan Program/Kegiatan	3PBD Ngada Kab

	bencana alam dan Bencana Non Alam				
		56.	Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	$\frac{\text{Jml Bencana Non Alam yang ditangani}}{\text{jml Bencana Non Alam yang terjadi}} \times 100$	Laporan Kegiatan BPBD Ngada Kab
20.	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	57.	Prosentase PMKS yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$ PMKS = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Laporan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kab. Ngada
21.	Terjalannya Kemitraan yang harmonis	58.	Persentase meningkatnya Kemitraan yang harmoni lembaga Sosial, Politik, Budaya dan Keagamaan	$\frac{\text{Jml realisasi pertemuan/kegiatan}}{\text{Jumlah rencana pertemuan kegiatan}} \times 100$	Laporan Program/Kegiatan Badan Kesbangpol Linmas
22.	Tersedianya Sarana Olah Raga dan Ruang Publik Bagi Masyarakat	59.	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Jumlah ketersediaan Master Plan dan Perencanaan TeFoknis (Dokumen)	Laporan Program/Kegiatan Dinas Pora Kab. Ngada
23.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah	60.	Jumlah Aparatur (Esselon II) yang blm mengikuti PIM II	Jumlah aparatur yang belum mengikuti PIM II	Laporan Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

		61.	Jumlah Aparatur (Eselon 3) yang blm mengikuti PIM III	Jumlah aparatur yang belum mengikuti PIM III	Laporan Data	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		62.	Jumlah Aparatur (Eselon 4) yang blm mengikuti PIM IV	Jumlah aparatur yang belum mengikuti PIM IV	Laporan Data	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		63.	Berkurangnya sarana dan prasarana Pemerintahan yang tidak memadai	Berkurangnya sarana dan prasarana pemerintah yang tidak memadai		
24.	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	64.	Jumlah SKPD yang melakukan pelayanan dengan sistem online	Perangkat daerah yang melakukan pelayanan dengan sistem online		
		65.	Persentase Ketersediaan Data SIPD	$\frac{\text{Jumlah data SIPD yang ada}}{\text{Jumlah data yang seharusnya ada}} \times 100\%$		
		66.	Konsistensi APBD terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dlm DPA yang sesuai}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam RKE}}$		
		67.	Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dlm RPJMD yang sesuai}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD}}$		
		68.	Konsistensi KUA PPAS terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dlm RKPD}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam KUA PPAS}} \times 100\%$		
		69.	Konsistensi APBD terhadap KUA PPAS	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dlm KUA PPAS}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD}} \times 100\%$		

	70.	Terlaksananya koordinasi lintas sector dan lintas sumberdana dalam pembangunan daerah	Jumlah koordinasi lintas sector dan intas sumter dana dalam pembangunan daerah dalam setahun		
25.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	71. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil Evaluasi BPK	Badan Keuangan dan Inspektorat
		72. Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Nilai Evaluasi LKJIP Kabupaten Ngada dari Kemenpan-RB	Hasil Evaluasi Kemendagri	Bagian Organisasi
		73. Meningkatnya status dan Score LPDP	Status dan score LPDP yang telah baik	Hasil Evaluasi Kemendagri	Bagian Pemerintahan
		74. Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	Temuan yang ditindaklanjuti dalam tahun berjalan	Laporan hasil pemutakhiran data	Inspektorat
26.	Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	75. Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Baru yang terbentuk dalam setahun	Hasil survei dan Laporan Data	Bagian Pemerintahan
		76. Terbentuknya Kecamatan Baru	Jumlah Kecamatan yang terbentuk dalam setahun	Hasil survei dan	Bagian Pemerintahan

